Ketika Warga Negara Meragukan Negara

Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

NEGARA sebagaimana sebuah organisasi pada umumnya, dianggap layak untuk tetap eksis manakala mampu memberikan kemanfaatan, baik internal maupun eksternal. Di lingkup internal negara, setidaknya terdiri dari 2 (dua) entitas utama yakni pejabat negara sebagai entitas yang menjalankan fungsi organisasi negara, dan warga negara sebagai entitas yang menjadi tolak ukur keberfungsian organisasi negara. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum didalam alinea IV UUD 1945 yakni "….. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …..". Dari kalimat tersebut menegaskan bahwa warga negara berhak atas kesejahteraan yang diselenggarakan oleh negara.

Namun didalam perkembangannya, seringkali terjadi gap hubungan antara warga negara dengan negara. Alasannya selalu mengerucut pada persoalan kesejahteraan, seperti ketidakadilan, ketidakmerataan, dan sejenisnya. Disaat warga negara meragukan negara didalam menyelenggarakan kesejahteraan, problem selanjutnya yang berkembang, negara seringkali tidak lekas tanggap dengan cara positif.

Protes, keluhan, ketidakpuasan yang ditunjukkan warga negara dengan berbagai cara yang terkadang disertai kecaman dan intimidasi, seolah dianggap sebagai suatu ancaman kestabilan negara sehingga respon yang ditunjukkan negara seringkali dilakukan dengan cara represif. Maka wajar jika hubungan antara kedua entitas tersebut semakin renggang.

Lantas apa ruginya ketika negara diragukan oleh warganya? Tentunya warga negara mempunyai posisi sebagai sumber kekuatan politik. Negara butuh memperoleh kepercayaan dan dukungan warganya. Kebijakan yang akan diselenggarakan oleh negara perlu memperoleh legitimasi, dimana itu bersumber dari warga negara. Manakala warga negara ragu terhadap negaranya sendiri, maka akan sulit tercipta kesepakatan politik yang menjadi salah satu kunci utama kestabilan negara, disamping supremasi hukum.

Dimana letak kesalahan negara? Mengapa masih saja warga negara merasa kecewa? Negara dengan pemerintahan dan para pejabat negara dalam rutinitasnya menyelenggarakan apa yang disebut dengan kebijakan publik. Proses kebijakan publik merupakan suatu siklus yang tidak pernah berhenti dan terus berlanjut. Kebijakan publik selalu diawali dari masalah publik, ditujukan pada penyelesaian masalah publik, hingga muncul masalah publik baru yang selanjutnya lagi-lagi akan memunculkan kebijakan publik baru, begitu seterusnya. Berbagai respon negatif yang ditunjukkan warga negara merupakan bagian dari siklus kebijakan dimana warga negara memberikan sumbangsih penyampaian masalah baru, sehingga perlu ditekankan bahwa respon negatif tersebut bukanlah ancaman kestabilan negara.

Maka problem utama kestabilan negara bukan pada respon negatif yang ditunjukkan warga negara, melainkan cara negara didalam mengelola respon negatif tersebut, bukan dengan cara-cara represif melainkan dengan cara-cara yang lebih positif, inovatif, dan humanis.

Lantas apa untungnya ketika warga negara memberikan respon negatif terhadap negara? Warga negara bukan musuh negara. Berbagai respon negatif yang seringkali ditunjukkan warga negara sejatinya menjadi satu pertanda baik dimana warga negara semakin peduli atas kinerja negara didalam menyelenggarakan kesejahteraan bagi warganya.

Karakteristik warga yang semakin aktif dan kritis bisa menjadi sumber daya baru didalam penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia. Warga negara bukan lagi ditempatkan sebagai kelompok sasaran kebijakan saja, namun sekaligus ditempatkan sebagai inisitor dan implementor kebijakan publik. Dengan peran warga negara yang diperluas didalam penyelanggaraan fungsi negara, harapannya negara semakin memahami ukuran kepuasan warga negara sehingga mampu meminimalisir gagalnya penyelenggaraan kebijakan publik. Perlu diingat kembali bahwa negara lahir atas kehendak segenap warga yang ingin diperjuangkan hak nya. Maka memastikan warga menjadi bagian dari penyelenggaraan negara menjadi penting untuk diakomodir.

Harmonisasi dan sinergi antara negara dan warga negara penting untuk menjamin kestabilan negara didalam menyelenggarakan fungsi utamanya yakni menjamin kesejahteraan. Negara hebat, negara kuat, negara yang manfaat. ***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

UMY Salurkan Rp 1,26 M Zakat Institusi

BANTUL (KR) - Zakat institusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) senilai Rp 1.260.000.000 diserahkan pada 57 Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sudah mengajukan proposal. Penyaluran zakat institusi ini berupa beasiswa, bantuan sesuai proposal hingga jenis bantuan lainnya.

KR-Istimewa

Pimpinan UMY, PWM DIY dan penerima zakat institusi secara simbolis.

"Dengan jumlah tersebut, UMY hanya bisa menyerahkan zakat institusi untuk 57 AUM. Masih banyak yang belum terbantu, karena proposal yang masuk dan diterima oleh Tim Zakat Institusi berjumlah 280 eksemplar," jelas Ketua Tim Zakat Institusi UMY, Eko Wahyudi dalam Pentasyarufan Zakat Institusi, Sabtu (28/1) di Gedung AR Fakhruddin B UMY. Periode penyaluran zakat institusi ini berlangsung pada Semester Ganjil 2022/2023 disebut dengan seleksi ketat. Penyerahan dilakukan secara simbolis.

Disebutkan Eko, dana zakat institusi ini juga bersifat sebagai dana pendamping yang nilainya tidak dapat memenuhi permintaan sesuai proposal yang diajukan. "Anggaplah zakat institusi ini sebagai dana pendamping bagi para penerima," tambah Eko lagi.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY Gita Danu Pranata SE MM menjelaskan, bahwa diksi 'Pentasyarufan Zakat Institusi' sudah dilaksanakan dua periode dengan sebutan awal, Dana Sosial. "Pentasyarufan Zakat Institusi ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Dan sejak itu, dana zakat institusi dikelola oleh Tim Zakat Institusi," ujarnya. **(Fsy)**

SOAL PENATAAN TENAGA HONORER

Pemda DIY Masih Tunggu Kejelasan Pusat

YOGYA (KR) - Pemerintah telah merencanakan penghapusan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer per 28 November 2023. Namun hingga kini, belum ada keputusan menyangkut penyelesaian masalah penataan tenaga honorer tersebut.

Menyikapi hal tersebut Pemda DIY masih menunggu kejelasan dari pusat terkait skenario penataan honorer di daerah. Meski begitu, setiap ada kesempatan, Pemda DIY terus berupaya melobi Kemenpan RB agar tenaga honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dapat dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kalau soal penataan tenaga honorer, sampai saat ini kami masih menunggu kebijakan dari pusat. Karena kewenangan berkaitan dengan itu ada di pemerintah pusat. Walaupun sebetulnya Pemda DIY telah melakukan pemetaan untuk memastikan Naban di Pemda DIY telah memenuhi persyaratan untuk menjadi PPPK. Setiap ada kesempatan kami juga bicara dengan Kemenpan RB, supaya tenaga bantu atau honorer tersebut bisa menjadi PPPK," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, K Baskara Aji di Yogyakarta, Sabtu (28/1).

Baskara Aji mengatakan, sebetulnya tahapan (proses) seleksi tenaga honorer yang dilakukan Pemda DIY sudah seperti seleksi PPPK. Untuk itu pihaknya berharap adanya kondisi itu bisa menjadi pertimbangan dari Kemenpan RB dalam pengambilan kebijakan. Dengan begitu kebijakan yang diambil bisa benar-benar tepat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Hal serupa dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani. Menurutnya sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan final dari kementerian terkait skema penghapusan tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY. Pasalnya berkaitan dengan penataan tenaga honorer, daerah sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan di taraf lokal sehingga pihaknya hanya bisa menunggu.

"Sampai saat ini kami masih menunggu kebijakan pusat nanti semuanya dari pusat semua. Karena Pemda tidak diberi ruang untuk menyusun kebijakan lokal jadi mau tidak mau harus menunggu pusat," ungkapnya.

Amin menyatakan, selama ini di Pemda DIY pegawai non-ASN dimasukan kategori tenaga pembantu atau Naban. Adapun untuk jumlahnya mencapai 3.400-an orang. Kebanyakan dari mereka mengisi posisi sebagai tenaga pendidik dan kesehatan. Pemda DIY merekrut ribuan Naban tersebut untuk mengatasi masalah kekurangan ASN mengingat ada sekitar 600 ASN yang purna tugas tiap tahunnya. **(Ria)-d**

Riyantono Ketua KSP Korpri Abdi Negara

KR-Sukro Riyadi

Pelantikan pengurus KSP Korpri Abdi Negara Bantul.

BANTUL (KR) - Pelantikan pengurus KSP Korpri Abdi Negara periode 2023-2025 digelar di Kompleks Pemkab Bantul. Momentum tersebut sekaligus menjadi tonggak KSP Korpri Abdi Negara Kabupaten Bantul,jika tahun 2023 bakal melakukan pengembangan keluasan usaha koperasi, perubahan badan hukum koperasi. Sedang jumlah anggota pada tutup buku tahun 2022 sebanyak 2.315 orang.

Sekda Bantul, Agus Budi Raharjo SKM MKes mengatakan, jika koperasi dengan kriteria sehat tentu semakin leluasa memperluas unit usaha. Hal tersebut akan menjadi lebih baik untuk perkembangan koperasi itu sendiri.

Ketua KSP Korpri Abdi Negara Drs Riyantono MSi, Jumat (27/1) mengatakan, dalam RAT tutup buku tahun 2022 dilaksanakan, Rabu (25/1), dihadiri 174 anggota, dari 200 orang anggota yang diundang dan telah memenuhi kuorum.

Dijelaskan, SHU KSP Korpri Abdi Negara Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp 811.294.824 lebih tinggi dibanding tahun 2022.

RAT tahun 2022 juga dihadiri Sekda Bantul Agus Budi Raharja SKM MKes, Kepala Dinas Koperai UKM dan Perindustrian Bantul Drs Agus Sulistyana MM, serta perwakilan PKPRI Bantul dan DEKOPINDA Bantul.

Selain laporan pertanggungjawaban pengurus RAT Tutup Buku 2022 juga dilaksanakan pemilihan pengurus periode 2023 - 2025. Pelantikan pengurusan baru dilakukan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul Agus Sulistyana.

Susunan pengurus KSP Korpri Abdi Negara periode 2023 - 2025 yakni, Ketua Pengawas Agus Budi Raharja, Pengawas, Ir Pulung Haryadi, Suparman. Ketua Drs Riyantono, Sekretaris 1 Rochma Bertiana, Sekretaris 2 Wijiyana. Bendahara 1 Ir Sri Supatmi MMA, Bendahara 2 Nurwidayati SE. **(Roy)-d**

MAYORA GROUP GELAR CAREER EXHIBITION

Beri Peluang Berkarir, Dibutuhkan 1.000 Karyawan

YOGYA (KR) - Mayora Group bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan didukung SKH *Kedaulatan Rakyat* akan menggelar Career Exhibition 2023. Event tersebut 3 meliputi Job Fair, Seminar dan Booth Games. Event Job Fair akan berlangsung Selasa (31/1) hingga Rabu 1 Februari 2023 di SMA Santo Thomas, Jalan Timoho, Balirejo Utara, Mujamuju, Kota Yogyakarta.

Heri Soesanto, HR Direktur Mayora Group mengatakan, Mayora Group sebagai perusahaan yang dinamis dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang luar biasa. "Maka membina dan mengembangkan generasi muda menjadi talent perusahaan menjadinl kunci sukses Mayora di masa depan," ujarnya, Sabtu (28/1).

Manajemen memilih dan memutuskan Kota Yogyakarta untuk mengawali event Career Exhibition 2023. Tentunya pertimbangan besar kami Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan. "Maka harapan besar kami event ini akan menjadi magnet yang kuat untuk para pencari kerja potensial tidak saja masyarakat Kota Yogyakarta, tapi juga Jawa Tengah dan sekitarnya dan bahkan mungkin Indonesia," ujarnya.

Ditegaskan, kota Yogyakarta Miniatur Indonesia. Mayora Group yakin event ini akan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat pencari kerja potensial yang sudah berpengalaman maupun Fresh Graduate.

Dalam tahun 2023 Mayora Group membuka kesempatan berkarir di semua divisi dan kurang lebih sekitar 1.000 karyawan yang kami cari baik lulusan SMK, S1 dan S2. "Maka silahkan datang dan siapkan CV terbaik Anda sebab event ini tidak dipungut biaya alias gratis," ujarnya.

Lebih lanjut Heri Soesanto mengatakan, Career Exhibition 2023 ini akan dihadiri secara langsung Pejabat Walikota Yogyakarta Sumadi SH MH, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarsi, Drs Maryustion Tonang MM. Ketua DPRD Kota Yogyakarta Komisi B Susanto Dwi Antoro, HR - Direktur Mayora Group, Heri Soesanto.

"Kehadiran beliau-beliau ini tentunya menjadi kehormatan besar dan dukungan yang luar biasa bagi kami. Tentu saja sebagai dukungan moral bagi calon pencari kerja yang akan berimbas mengurangi angka pengangguran di Kota Yogyakarta dan sekitarnya," ucapnya.

KR-Jayadi Kastari

Selama 2 hari, pelaksanaan Career Exhibition akan berlangsung di SMA Santo Thomas Jalan Timoho, Balirejo Utara, Mujamuju, Kota Yogyakarta.

KR - Istimewa

Heri Soesanto

Heri Soesanto menjelaskan, Mayora Group yang berkantor pusat di Jakarta merupakan Fast Moving Consumer Goods Companies terbesar di Indonesia. Sekaligus sebagai produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya "Top Five Best Managed Companies in Indonesia" dari Asia Money, "Top 100 Exporter Companies in Indonesia" dari Majalah Swa, "Top 100 Public listed Companies" dari Majalah Investor Indonesia, "Best Manufacturer of Halal Products" dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita Satu, "Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector, dari Warta Ekonomi. Masih banyak lagi penghargaan lainnya. "Mayora Group sebagai perusahan publik, telah melebarkan pangsa pasarnya tidak saja ke negara-negara di Asia, tapi telah menembus pasar di 100 negara. Maka menjadi sebuah pilihan yang tepat kalau Anda akan berkarir di Mayora Group." tandasnya. **(Jay)**

SMP MARSUDIRINI

Gelar Karya dan Perayaan Imlek

KR-Juvintarto

Gelar Karya dan Perayaan Imlek di SMP Marsudirini berlangsung meriah.

YOGYA (KR) - Gelar Karya Siswa SMP Maria Immaculata Marsudirini dengan tema 'Bersatu Dalam Keberagaman' digelar sekaligus bersamaan Perayaan Imlek, Jumat (28/1), di aula dan halaman sekolah.

"Gelar karya sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka, melaksanakan Profil Pelajar Pancasila," tutur Sie Acara Y Sigit Prasetyo SPd MPd kepada *KR* di sela acara .

Disebutkan, gelar karya menampilkan kolaborasi seni dari kelas 7, yaitu kolaborasi seni tari, kolaborasi seni menyanyi medley lagu daerah, dan kolaborasi fashion show yang akan menampilkan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. "Juga memamerkan makanan tradisional nusantara," jelasnya

Sementara pentas seni menampilkan kesenian dari kelas 8 dan 9, yang meliputi gerak dan lagu, bernyanyi bersama, drama, drama musikal, ansambel, duet gitar akustik, penampilan ekstrakurikuler Tari Tradisional, Dance, Paduan Suara dan Band.

"Acara dimeriahkan penampilan Musikalisasi Puisi dari SMA Santa Maria dan penampilan dari bapak ibu guru," jelasnya.

Dimeriahkan barongsai dari Grup Mutiara Naga. Barongsai menampilkan Singa Samsi dan Naga Liong. Acara berlangsung meriah dihadiri seluruh guru, karyawan dan siswa. Dibuka perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. **(Vin)-d**